



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MALANG
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UMAR USMAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **829446**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.106.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/310 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 46 m2/92 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 411.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/40 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
4. Tanah Seluas 2400 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 248.100.000

1. MOBIL, HONDA BRV DG3 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
2. MOTOR, HONDA KARISMA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 5.150.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 30.426.670

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.389.676.670

III. HUTANG

Rp. 1.088.300.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.301.376.670

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.